

# Panduan Praktis Penggunaan JDIH Kabupaten Jepara

## BAB I

### Apa itu JDIH?

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum secara cepat, tepat, akurat, dan terbuka. JDIH menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang hukum, sehingga masyarakat maupun aparatur pemerintah dapat dengan mudah memperoleh produk hukum yang berlaku.

Pembentukan JDIH memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Aturan ini mengamanatkan setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi untuk membentuk JDIH sebagai bagian dari jaringan nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adapun tujuan pembentukan JDIH adalah untuk:

- a) Menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
- b) Memberikan kemudahan akses informasi hukum kepada masyarakat secara cepat dan terbuka.
- c) Meningkatkan efektivitas penyebaran produk hukum pemerintah.
- d) Menjadi sumber rujukan resmi bagi masyarakat, akademisi, maupun aparatur pemerintah dalam memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkup daerah, JDIH Kabupaten Jepara berfungsi sebagai portal hukum resmi pemerintah daerah yang menyediakan berbagai produk hukum daerah, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Keputusan Bupati, hingga Instruksi Bupati. Keberadaan JDIH Jepara memastikan bahwa setiap kebijakan hukum daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### Mengapa Harus Menggunakan JDIH?

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bukan hanya sekadar portal hukum, melainkan sarana penting yang memberikan berbagai manfaat baik bagi masyarakat maupun

aparatur pemerintah. Melalui JDIH, akses terhadap produk hukum menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa JDIH perlu digunakan:

1. Transparansi:

JDIH menjamin keterbukaan informasi publik di bidang hukum. Seluruh produk hukum yang dihasilkan pemerintah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Akurat:

Dokumen yang tersedia di JDIH merupakan dokumen resmi pemerintah daerah yang telah melalui proses validasi. Hal ini memastikan bahwa produk hukum yang diakses masyarakat adalah versi yang benar, sah, dan berlaku.

3. Efisien:

JDIH memudahkan pencarian peraturan perundang-undangan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Cukup dengan mengetik kata kunci atau nomor peraturan, pengguna dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan dalam hitungan detik, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

4. Gratis:

Seluruh layanan JDIH dapat diakses tanpa biaya. Masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pungutan, karena JDIH merupakan layanan publik yang disediakan pemerintah secara cuma-cuma.

5. Meningkatkan Literasi Hukum:

Melalui JDIH, masyarakat dapat lebih mudah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tingkat literasi hukum masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih baik.

Dengan manfaat tersebut, JDIH menjadi sumber rujukan resmi yang dapat diandalkan, baik oleh masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun aparatur pemerintah daerah.

### BAB III

#### Cara Mengakses JDIH

Agar masyarakat maupun aparatur pemerintah dapat memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan optimal, diperlukan pemahaman mengenai cara mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah praktis dalam mengakses JDIH Kabupaten Jepara:

#### **Langkah 1: Membuka Website**

- 1) Buka aplikasi browser di perangkat Anda, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.
- 2) Masukkan alamat resmi: [jdih.jepara.go.id](http://jdih.jepara.go.id) ada kolom pencarian, kemudian tekan Enter.

- 3) Halaman utama JDIH Jepara akan tampil sebagai beranda awal.

#### Langkah 2: Navigasi Menu Utama

Pada halaman utama, tersedia beberapa menu yang dapat diakses sesuai kebutuhan, antara lain:

- 1) **Beranda** → Tampilan awal website dengan informasi umum.
- 2) **Produk Hukum** → Menyediakan berbagai peraturan, seperti *Peraturan Daerah (Perda)*, *Peraturan Bupati (Perbup)*, *Keputusan Bupati*, hingga *Instruksi Bupati*.
- 3) **Berita Hukum** → Menyajikan informasi terkini terkait kegiatan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- 4) **Dokumentasi** → Menyimpan arsip kegiatan, seperti sosialisasi hukum dan kegiatan lain yang berkaitan.
- 5) **Pencarian** → Mempermudah pengguna untuk mencari produk hukum berdasarkan kata kunci tertentu.

#### Langkah 3: Cari Produk Hukum

1. Pilih menu **Produk Hukum** pada menu utama.
2. Tentukan jenis peraturan yang ingin dicari (misalnya Perda, Perbup, atau Keputusan).
3. Masukkan **kata kunci**, seperti judul atau nomor peraturan, pada kolom pencarian.
4. Klik tombol pencarian, kemudian akan muncul daftar hasil sesuai kata kunci.
5. Pilih dokumen yang diinginkan, lalu klik untuk **mengunduh file dalam format PDF**.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk hukum resmi yang dibutuhkan. Hal ini mendukung prinsip **akses informasi hukum yang cepat, tepat, dan transparan** sesuai dengan tujuan pembentukan JDIH.

## BAB IV

### Fitur Penting JDIH

Untuk memudahkan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mengakses serta memanfaatkan produk hukum, **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)** dilengkapi dengan berbagai fitur penting. Fitur-fitur ini dirancang agar pencarian dan penggunaan dokumen hukum menjadi lebih praktis, efisien, dan ramah pengguna. Berikut adalah beberapa fitur utama yang tersedia di JDIH:

1. **Fitur Pencarian Cepat**

JDIH menyediakan kolom pencarian dengan **filter tahun, jenis peraturan, hingga nomor dokumen**, sehingga pengguna dapat menemukan produk hukum yang dibutuhkan secara lebih spesifik.

2. **Download Dokumen PDF**

Setiap produk hukum yang tersedia dapat **diunduh langsung dalam format PDF**. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menyimpan dokumen dan membacanya secara offline.

3. Ringkasan (Abstrak)

Sebelum mengunduh dokumen, pengguna dapat membaca **abstrak atau ringkasan isi peraturan**. Ringkasan ini membantu memahami pokok-pokok aturan tanpa harus membaca seluruh dokumen terlebih dahulu.

4. QR Code Akses Cepat

Beberapa dokumen maupun publikasi hukum dilengkapi dengan **QR Code**, yang dapat dipindai menggunakan smartphone. Dengan fitur ini, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman produk hukum terkait di website JDIH.

Dengan adanya fitur-fitur ini, **JDIH Kabupaten Jepara** tidak hanya menjadi portal hukum biasa, melainkan juga sarana modern yang mendukung keterbukaan informasi publik serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen hukum yang sah, akurat, dan terpercaya.

## BAB V

### Tips Memanfaatkan JDIH

Agar pemanfaatan **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)** lebih optimal, diperlukan strategi penggunaan yang tepat, baik bagi masyarakat umum maupun perangkat daerah. Berikut beberapa tips yang dapat dijadikan pedoman:

1. Untuk Masyarakat

- a) **Gunakan JDIH sebagai referensi resmi** → pastikan Anda merujuk pada produk hukum yang terdapat di JDIH, bukan informasi dari media sosial atau sumber yang tidak terverifikasi.
- b) **Baca ringkasan (abstrak) terlebih dahulu** sebelum mengunduh dokumen. Ringkasan ini memuat garis besar isi peraturan sehingga dapat membantu memahami pokok aturan dengan cepat.
- c) **Manfaatkan fitur pencarian cepat** dengan kata kunci, tahun, atau jenis peraturan agar pencarian lebih efisien.
- d) **Simpan dokumen PDF** yang relevan agar dapat dibaca ulang meskipun sedang offline.

2. Untuk Perangkat Daerah

- a) **Jadikan JDIH sebagai sumber utama** dalam menyusun kebijakan, program, maupun kegiatan yang memerlukan dasar hukum.
- b) **Selalu gunakan dokumen dari JDIH** untuk memastikan keaslian dan keabsahan produk hukum yang dijadikan rujukan.
- c) **Perbarui pengetahuan hukum secara berkala** dengan mengikuti berita hukum maupun dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui JDIH.

- d) **Integrasikan JDIH dalam proses kerja** agar setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memanfaatkan JDIH secara tepat, masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajiban hukumnya, sementara perangkat daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan dasar hukum yang jelas. Pada akhirnya, JDIH hadir sebagai sarana penting untuk mewujudkan **transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan literasi hukum di Kabupaten Jepara.**